

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 623 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH **TAHUN 2020** WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaran Ibadah Haji pasal 11 ayat (2) huruf a perlu adanya persetujuan penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Walikota tentang Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 66, Indonesia Nomor 4400);
- Nomor 33 Tahun 5. Undang-Undang 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Tahun Nomor 13 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun Undang-undang 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

Tahun 7. Undang-Undang Nomor 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor Pemerintahan Daerah (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Transportasi Keberangkatan Jama'ah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk Tim Pemandu Haji Daerah sedangkan Tim Kesehatan Haji Daerah dianggarkan melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 623 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM
KESEHATAN HAJI DAERAH TAHUN 2020

TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN KESEHATAN HAJI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	N A M A	TUGAS	KETERANGAN
1.	HABIB ALI AL KAFF	TPHD	Membantu dan memberikan pelayanan bagi Jamaah Haji asal Daerah Kota Banjarmasin yang meliputi pelayanan bimbingan Ibadah Haji dengan bekerja sama secara sinergi dengan petugas lain
2.	dr.H.FAJAR SUKMA NAN AGUNG	TKHD	Membantu dan memberikan pelayanan bagi Jamaah Haji asal Daerah Kota Banjarmasin, yang meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan umum dengan bekerja sama secara sinergi dengan petugas lain
3.	dr. SISMIYATI	TKHD	Membantu dan memberikan pelayanan bagi Jamaah Haji asal Daerah Kota Banjarmasin, yang meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan umum dengan bekerja sama secara sinergi dengan petugas lain

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA